



LEMHANNAS RI

NEWSLETTER

TIADA KEBENARAN YANG MENDUA

EDISI XVI, 20 NOVEMBER 2010



(Dok. nas/ Setneg)

Presiden Republik Indonesia, DR. Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, saat upacara penyambutan di Istana Merdeka.

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| 1. Kunjungan Obama ke Indonesia..... | 1 |
| 2. Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Pemerintah Daerah Angkatan XXV-2010..... | 2 |
| 3. Forum Konsolidasi Angkatan IV Pimpinan Pemerintahan Daerah, Bupati, Walikota, dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota..... | 3 |
| 4. Penanganan Human Trafficking untuk menjaga Harkat dan Martabat Bangsa..... | 4 |
| 5. Peningkatan Wawasan Kebangsaan Generasi Muda... .. | 4 |
| 6. Peningkatan Peran TNI dalam Operasi militer selain Perang dalam rangka Mensukseskan Pembangunan.. | 5 |
| 7. Dialog Interaktif Gubernur..... | 6 |
| 8. Kerjasama Lemhannas RI-AMPI..... | 7 |
| 9. Peringatan Sumpah Pemuda ke-82 di Lemhannas RI.. | 7 |
| 10. Kunjungan Gubernur Lemhannas RI ke Mesir dalam rangka SSLN PPRA XLV..... | 8 |
| 11. Kunjungan Delegasi Political Academy-Vietnamese People's Armed Forces (VPA)..... | 9 |
| 12. Kunjungan Chinese People's Liberation Army Command Academy | 10 |
| 13. Sertijab dan Pelantikan Pejabat Eselon I, II, dan III..... | 11 |
| 14. Intellectual Exercise Dewan Pengarah | 12 |

Kunjungan Obama ke Indonesia

Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, berkunjung ke Indonesia pada tanggal 9 - 10 November 2010 sebagai bagian dari kesungguhan Amerika Serikat dan Indonesia dalam mempererat hubungan kedua negara. Salah satu agenda penting dalam kunjungannya adalah pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Indonesia, DR. Susilo Bambang Yudhoyono, untuk membahas sejumlah agenda dan kerja sama.

yaitu berkunjung ke Masjid Istiqlal dan juga memberikan kuliah umum di kampus UI, Depok, Jawa Barat, tentang demokrasi, pembangunan, pluralisme, dan toleransi beragama. Dalam kuliah umum tersebut, Obama menyampaikan apresiasi tentang gerakan reformasi dan pilihan Indonesia untuk melakukan tranformasi demokratis. Obama juga memuji semangat pluralisme dan toleransi beragama yang dimiliki Indonesia. Ia menegaskan, apa yang terpapar dalam makna Bhinneka Tunggal Ika mestinya menjadi contoh dunia.

Beberapa agenda Presiden Amerika Serikat di Indonesia



(Dok. nas/ Setneg)

Presiden Amerika Serikat ke-44, Barack Obama, tengah menyalami Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H., saat upacara penyambutan kedatangan Presiden Amerika Serikat tersebut di Istana Merdeka pada 9 November 2010.

PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA PEJABAT PEMERINTAH DAERAH ANGKATAN XXV-2010



Gubernur Lemhannas RI memberikan ucapan selamat kepada para peserta Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Pemerintah Daerah Angkatan XXV-2010

Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Konsepsi Nasional, dan Kepemimpinan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Pemerintah Daerah Angkatan XXV tahun 2010 dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H. pada 18 Oktober 2010 di Gedung Dwiwarna Purwa Lemhannas RI.

Pemantapan nilai-nilai kebangsaan sebagai bagian konsolidasi demokrasi yang pada hakikatnya merupakan upaya untuk memberikan pencerahan secara dialogis kepada para peserta dengan materi-materi yang telah menjadi bahan ajaran inti Lemhannas yang harus dipahami oleh setiap peserta, sehingga para peserta akan mampu berpikir secara sistemik dan komprehensif integral untuk kepentingan nasional dalam kerangka NKRI, menumbuhkan sikap antisipatif, kooperatif, sinergik terhadap kepentingan rakyat, dan peduli terhadap potensi yang dimiliki daerah dan menumbuhkembangkan kemandirian daerah serta komitmen

terhadap kelangsungan pembangunan nasional yang menjamin ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kesejahteraan rakyat.

Program pemantapan nilai-nilai kebangsaan konsepsi nasional dan kepemimpinan bagi pimpinan dan anggota DPRD serta pejabat pemerintah daerah angkatan XXV tahun 2010, dilaksanakan selama 1 minggu dan ditutup pada tanggal 24 Oktober 2010 di Secapa POLRI Sukabumi. Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Plt. Deputy Taplai, Mayjen TNI (Mar) Eddy Oetomo, mengharapkan agar para peserta dapat lebih menyempurnakan kemampuannya dalam mengkritisi permasalahan aktual yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya yang terkait langsung dengan peran, fungsi DPRD dan pemerintahan daerah sebagai wadah komunitas partai politik di Indonesia. Dengan demikian, DPRD sebagai organisasi pemerintahan di daerah yang diwakili oleh para anggota DPRD bersama pejabat pemerintah daerah dapat semakin memperluas cakrawala pandang serta mempunyai filosofi cara berpikir komprehensif guna mendukung penyelesaian tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat di daerah.



Peserta Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Pemerintah Daerah Angkatan XXV-2010, mengikuti acara pembukaan.

Forum Konsolidasi Angkatan IV Pimpinan Pemerintahan Daerah, Bupati, Walikota, dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota



Peserta Forum Konsolidasi yang terdiri dari Pimpinan Pemerintahan Daerah, Bupati, Walikota, dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota, mengikuti acara pembukaan di Gd. Dwiwarna Purwa

Salah satu implementasi peran Lemhannas RI dalam menyiapkan dan memantapkan pimpinan tingkat nasional yaitu dengan menyelenggarakan Forum Konsolidasi (Forkon) Angkatan IV untuk Pimpinan Pemerintahan Daerah Bupati, Walikota, dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota. Forkon dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H. pada tanggal 19 Oktober 2010 di Gedung Dwiwarna Purwa, di ikuti oleh total 34 peserta yang terdiri atas, 10 orang bupati, 5 orang wakil bupati, 6 orang walikota, 8 orang ketua DPRD kabupaten dan 5 orang ketua DPRD kota.

Dalam sambutannya, Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H. menyampaikan bahwa tugas Lemhannas RI adalah memantapkan para pimpinan agar memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif sehingga memiliki kemampuan strategis dalam mengantisipasi dan mengatasi krisis. "Khusus Forum Konsolidasi Angkatan

IV diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi di daerah antaralain: disintegrasi bangsa, krisis multi dimensional, lingkungan hidup, tuntutan untuk lebih demokratis, mengatasi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan, serta mengatasi bencana," kata Gubernur.

Peserta Forkon diharapkan dapat memenuhi tuntutan reformasi dan mencari solusi permasalahan baik di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Gubernur melihat, situasi yang sedang dihadapi Indonesia sekarang ini, sangat berpotensi mengancam integritas bangsa, gerakan yang bersifat kelompok dan berlatar belakang kepentingan kedaerahan, suku, agama dan lain sebagainya harus menjadi perhatian secara cermat dan seksama.

Dalam menghadapi kuatnya arus pengaruh globalisasi, pelaksanaan pembangunan nasional memerlukan kondisi ketahanan masing-masing

daerah dan diharapkan terwujudnya kondisi ketahanan nasional yang mantap. Untuk mencapai kondisi tersebut, diperlukan adanya usaha pemahaman dan penghayatan wawasan nusantara sebagai rambu-rambu penentuan arah dan konsepsi ketahanan nasional sebagai penentu lingkup, volume, dan intensitas pembangunan di daerah dalam kerangka pembangunan nasional secara bulat dan utuh.



Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H. tengah menyampaikan kuliah kepada peserta Forkon Angkatan IV.



Wakil Gubernur, Marsdya TNI DR. Rio Mendung Thalieb, membuka Roundtable Discussion Bidang Hubungan Internasional.

Menurut data dari *the United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) kebanyakan manusia yang diperdagangkan berasal dari 127 negara, mereka dieksploitasi ke 137 negara. Di Indonesia sendiri, angka perdagangan manusia untuk eksploitasi kerja dan seksual tergolong tinggi, yaitu terdapat 3.785 korban yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Korban perdagangan manusia dari Indonesia diperdagangkan untuk eksploitasi seksual dan kerja di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Taiwan, Jepang, Hong Kong, maupun Timur Tengah. Indonesia juga menjadi negara tujuan perdagangan orang yang berasal dari Republik Rakyat Cina (RRC), Thailand, Hong Kong, Uzbekistan, Belanda, Polandia, Venezuela, Spanyol, dan Ukraina.

Pembangunan bangsa ke arah yang lebih bermartabat merupakan tujuan dari semua negara, untuk itulah diselenggarakan *Roundtable Discussion* bertema "Penanganan *Human Trafficking* guna menjaga Harkat dan Martabat Bangsa

PENANGANAN *HUMAN TRAFFICKING* UNTUK MENJAGA HARKAT DAN MARTABAT BANGSA

di Lingkungan Regional dalam Rangka Ketahanan Nasional" yang dibuka oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsdya TNI DR. Rio Mendung Thalieb, pada 19 Oktober 2010 di Ruang Nusantara I. RTD tersebut juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Dede Yusuf, yang memberikan pandangannya terkait dengan tingginya angka *trafficking* di Jawa Barat.

Trafficking secara luas diartikan sebagai "perdagangan yang berkonotasi ilegal", yang artinya perdagangan orang. Eksploitasi yang dilakukan terhadap orang adalah hal krusial yang berbentuk seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, penjualan organ tubuh, dan



Wakil Gubernur Jawa Barat, Dede Yusuf, sebagai penanggap dalam RTD tentang penanganan *Human Trafficking*

lain-lain. Bahkan telah masuk pada ranah perbudakan modern yang menjadikan manusia sebagai komoditi perdagangan dan meletakkan nilai ekonomi pada kehidupan

manusia, dan bagi sebagian pihak, hal tersebut telah menjadi suatu bisnis yang menggiurkan, melalui pemanfaatan teknologi yang canggih.

Modernisasi memunculkan *prosperity and security gap* yang berimplikasi pada tumbuhnya dorongan bagi terjadinya berbagai tindak kriminal transnasional, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok-kelompok yang terorganisir.

Human trafficking mempunyai dampak sosial yang sangat besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Rentannya masyarakat terhadap kesulitan ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, rentannya nilai-nilai keluarga dan masyarakat dari pengaruh global, serta para "agen (sindikat)" yang melihat *human trafficking* sebagai peluang bisnis menggiurkan menjadikan permasalahan penanganannya semakin rumit.

Kompleksnya permasalahan *human trafficking* memerlukan adanya sinergitas antar institusi dan *stakeholder* dalam upaya pencegahan, perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, serta kepastian hukum yang mampu menjerat para "sindikatnya" menjadi salah satu kunci penyelesaian permasalahan.

Saat ini, pemerintah telah mengambil berbagai langkah komprehensif dalam upaya menangani dan meminimalisir tindak pidana perdagangan orang melalui kerja sama dengan berbagai LSM dan organisasi internasional.

PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN GENERASI MUDA

Pemuda adalah generasi yang akan melanjutkan pembangunan nasional untuk mensejahterakan masyarakat.

Mengingat pentingnya peran pemuda untuk Indonesia, Direktorat Pengkajian Politik menyelenggarakan *Roundtable Discussion* berjudul "Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Generasi Muda untuk Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam rangka Menjaga Keutuhan NKRI" pada 20 Oktober 2010 di Ruang Nusantara. RTD yang dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H, dihadiri Menteri Pemuda Olah

Raga, Andi Alfian Mallarangeng, sebagai narasumber.

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia mencatat peran pemuda dalam momentum perjuangan kebangsaan, mulai dari Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, perjuangan kemerdekaan 1945, kelahiran Orde Baru 1966, hingga gerakan reformasi 1998. Pemuda memiliki posisi tawar yang tinggi yang terbukti lewat keniscayaan sejarah seperti dalam pidato Bung Karno pada Kongres Indonesia Raya di Surabaya tahun 1931:

"Berilah saya seribu orang tua, saya ber-



Gubernur Lemhannas RI menyampaikan keynote speech kepada peserta acara Roundtable Discussion.

sama mereka kiranya dapat memindahkan Gunung Semeru. Tetapi, apabila saya diberi sepuluh pemuda yang bersemangat dan berapi-api kecintaannya terhadap bangsa dan tanah air tanah tumpah darahnya, saya akan dapat menggemparkan dunia.”

Saat ini, dunia membutuhkan pemuda yang visioner dan memiliki wawasan kebangsaan sebagai bagian dari "nation and character building". Karakter pemuda dengan wawasan kebangsaan yang kokoh telah terbukti menyelamatkan Indonesia dari proses balkanisasi, yaitu situasi di mana terpecahnya suatu negara multikultural menjadi negara-negara kecil yang bermusuhan satu sama lain.

"Pasca reformasi 1998, gerakan pemuda cenderung mengikuti substansi demokrasi yang mengutamakan HAM termasuk kebebasan berpikir. Motto kebebasan

mewarnai gerakan pemuda dalam jangka pendek," kata Gubernur. Isu yang dihadapi pemuda saat ini adalah pembentukan karakter sebagai generasi penerus, proses ini menjadi sulit karena lemahnya koordinasi dan integrasi sebagai akibat banyaknya lembaga/instansi pusat dan daerah yang terlibat dan berkepentingan. Dalam kaitan "nation and character building" ada beberapa isu yang terkandung dalam gagasan awalnya. **pertama**, kemandirian; **kedua**, demokrasi; **ketiga**, persatuan nasional; dan **keempat**, martabat internasional. Hal itu adalah wujud kedaulatan sebagai bangsa yang merdeka dan bersatu untuk mendapatkan pengakuan dan wibawa di dunia internasional.

Guna membangun bangsa yang berkarakter dan beradab maka dibutuhkan sumber daya insani yang unggul dan

berdaya saing serta penanaman wawasan kebangsaan untuk membangun pemuda berkarakter tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan berjiwa Pancasila melalui pembentukan karakter secara terencana sehingga tumbuh generasi yang memahami hakikat kecintaan kepada bangsa dan negaranya.



Roundtable discussion bidang politik tentang wawasan kebangsaan pada generasi muda.

PENINGKATAN PERAN TNI DALAM OPERASI MILITER SELAIN PERANG DALAM RANGKA MENSUKSESKAN PEMBANGUNAN

Roundtable discussion bertema Peningkatan Peran TNI dalam Operasi Militer selain Perang untuk Memperkuat Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta dalam rangka Mensukseskan Pembangunan Nasional diselenggarakan pada 21 Oktober 2010 di Lemhannas RI di ruang rapat Nusantara I Gd. Trigatra Lemhannas RI. Acara tersebut dihadiri Menteri Pertahanan, Prof. DR. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc. dan sejumlah pejabat Lemhannas RI.

Salah satu arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang yang dimuat dalam Bab IV UU RI No. 17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang 2005-2025 adalah terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah NKRI dan kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.

TNI sebagai alat pertahanan negara yang memiliki kemampuan dan kekuatan, diharapkan dapat berperan aktif untuk membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan yang ada melalui pelaksanaan tugas operasi selain perang. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut: **pertama**, membuat atau merevisi peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok TNI; **kedua**, meningkatkan

koordinasi antar instansi pemerintah pemangku tugas fungsi pertahanan dan keamanan negara; **ketiga**, meningkatkan pembinaan kepada masyarakat terkait dengan implementasi sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta; **keempat**, memberikan penegasan tentang penafsiran yang jelas dan demokratis tentang makna "kebijakan dan keputusan politik negara"; dan **kelima**, perlunya segera dibentuk dewan keamanan nasional yang memiliki basis hukum yang jelas.

Secara *yuridis* sesungguhnya TNI harus berperan aktif dalam melaksanakan tugasnya termasuk operasi militer selain perang sebagaimana yang diuraikan di atas. Namun secara implementasinya sebagian besar belum dapat dilakukan secara maksimal. Kondisi tersebut karena adanya Pasal 7 Ayat (3) UU RI No. 34 Tahun

2004 tentang TNI yang menyatakan bahwa "ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara".

Sementara kondisi politik saat ini sangat dinamis, dan cenderung belum mencerminkan komitmen yang tinggi atau konsisten untuk memaksimalkan tugas pokok TNI khususnya melalui operasi militer selain perang.

Dalam *keynote speech*-nya, Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H. menyatakan bahwa peningkatan tugas TNI dalam operasi militer selain perang untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta harus didasarkan pada kepentingan nasional (*national interest*) sehingga nantinya dapat mencerminkan harmonisasi dan sinkronisasi baik pada tataran kebijakan maupun tahap operasionalitas.



Menteri Pertahanan hadir pada Roundtable Discussion bidang Hankam



Suasana RTD yang berlangsung di Ruang Nusantara I, Gd. Trigatra

DIALOG INTERAKTIF GUBERNUR



Dialog Interaktif Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi, SH tentang setahun potret dan capaian kinerja Lemhannas RI Tahun 2010

Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H. tampil pada acara dialog interaktif di TVRI sebagai narasumber utama dengan tema “setahun potret dan capaian kinerja Lemhannas RI” pada 20 Oktober 2010, dihadiri Guru Besar IPB, Prof. DR. Bomer Pasaribu dan Anggota Komisi I DPR RI, DR. Hj. R. Adjeng Ratna Suminar, SH, MM. sebagai narasumber pendamping.

Di awal perbincangan Gubernur menjelaskan bahwa atas dasar Perpres No. 67 tahun 2006, Lemhannas RI berfungsi **pertama**, sebagai Pusat Pelatihan Pimpinan tingkat Nasional baik dari TNI, Polri, Sipil, Ormas, Orpol, dan tokoh masyarakat; **kedua**, sebagai lembaga kajian strategis yang hasilnya disumbangkan kepada Presiden sebagai masukan; **ketiga**, sebagai lembaga yang ditugasi untuk memantapkan nilai-nilai kebangsaan; **keempat**, melakukan kerjasama dengan lembaga yang setara di dalam maupun luar negeri.

Gubenur menyampaikan target kinerja tahun ini antara lain adalah memberikan pengetahuan seperti wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, kesadaran nasional terhadap lingkungan strategis yang berkembang secara dinamik baik nasional, regional maupun global, dan pengetahuan untuk berpikir sistemik dengan pendekatan secara komprehensif, integral dan holistik.

DR. Hj. R. Adjeng Ratna Suminar, SH, MM. mengatakan sebagai alumni Lemhannas, Lemhannas memiliki kelebihan sebagai lembaga pendidikan karena terdapat ilmu yang menjaga kedaulatan negara, dan bagaimana mengembangkan diri, dan kepemimpinan, yang selanjutnya

ilmu tersebut dapat digunakan dan sangat membantu dalam mengaplikasikan diri sebagai anggota DPR RI.

Gubernur Lemhannas RI juga menyampaikan bahwa Lemhannas RI telah menyelesaikan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIV yang berakhir awal Oktober, sedangkan PPRA XLV masih berjalan. Selain itu dilaksanakan juga Forum Konsolidasi (Forkon) Bupati, Walikota, dan Ketua DPRD Angkatan ke IV dan Adeksi untuk anggota DPRD kabupaten dan kota dalam rangka pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Lemhannas RI juga membuat kajian-kajian strategik yang dirumuskan melalui *roundtable discussion* baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, maupun hubungan internasional yang nanti hasilnya diserahkan kepada Presiden RI.

Sedangkan Guru Besar IPB, Prof. DR. Bomer Pasaribu, menjelaskan bahwa Lemhannas RI memiliki fokus keunggulan dalam setiap ilmu yang disampaikan dengan sudut pandang atau pemikiran yang berbeda yakni secara sistemik dengan menggunakan pendekatan-pendekatan secara integral, komprehensif dan holistik agar para calon pemimpin tingkat nasional tidak berpikir sektoral dalam satu aspek saja. Selain itu tidak hanya diberikan ilmu pengetahuan dan teknologi saja tapi menanamkan karakter, *mindset*, dan sikap mental untuk melihat keseluruhan secara komprehensif, integral, dan holistik, serta sebagai lembaga *think-tank*, Lemhannas membuat kajian-kajian yang mendalam jauh melampaui zamannya untuk konsepsi-konsepsi sebagai masukan kepada Presiden RI.

PENANDATANGANAN KERJASAMA LEMHANNAS RI - AMPI

Lembaga Ketahanan Nasional RI pada tanggal 20 Oktober 2010 menandatangani kerjasama dengan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dalam rangka memberikan kesempatan kepada pengurusnya untuk mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA). AMPI adalah organisasi pemuda yang didirikan tahun 1968 yang *concerned* terhadap isu kepemudaan dan kemasyarakatan. Kerjasama dengan Lemhannas RI adalah sebagai bentuk upaya untuk kaderisasi dan pembinaan bagi anggota AMPI dan menyiapkan para pemimpin masa depan, karena hal tersebut menjadi peranan strategis bagi organisasi kepemudaan seperti AMPI.

Dalam bidang pendidikan, kerjasama antara Lemhannas RI dan AMPI diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan AMPI mampu menyikapi, mengantisipasi, dan melakukan langkah-langkah strategis (cerdas, efisien, cepat, dan lebih baik) dalam menghadapi setiap perkembangan lingkungan strategis yang semakin kompleks. Di bidang pementapan nilai-nilai kebangsaan, AMPI dapat merencanakan kegiatan bagi para anggotanya untuk mengikuti pementapan penghayatan nilai-nilai kebangsaan secara demokratis dan dialogis. Dengan pelatihan ini diharapkan pula dapat mensinkronkan cara pandang dan sikap para pemuda mengenai jati diri dan lingkungannya.

Dalam bidang pengkajian, diharapkan AMPI dapat melaksanakan pengkajian yang bersifat konseptual dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional terutama menyangkut hal yang relevan dengan peran dan fungsi bidang kepemudaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam bentuk kajian kontemporer, aktual, maupun yang berlanjut.



Penandatanganan kerjasama Lemhannas RI dengan AMPI yang disaksikan oleh Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H.

PERINGATAN KE-82 HARI SUMPAAH PEMUDA DI LEMHANNAS RI

Lemhannas RI pada tanggal 28 Oktober 2010 melaksanakan upacara peringatan ke-82 Hari Sumpah Pemuda dan bertindak sebagai inspektur upacara adalah Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsdya TNI DR. Rio Mendung Thalieb, dengan peserta upacara segenap pejabat dan anggota Lemhannas RI, serta para peserta Forkon angkatan IV.

Sumpah Pemuda yang dikumandangkan pertama kalinya pada Kongres Pemuda Indonesia ke-2 tanggal 28 Oktober 1928



Kolonel Kes Drs. Yudi Triono menjadi Komandan upacara peringatan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2010.

merupakan gerakan pemersatu tanah air, bangsa dan bahasa. Di dalamnya menyatu segenap komponen bangsa dari berbagai daerah, suku dan agama, bersatu-padu bahu-membahu dalam wujud nasionalisme yang kuat untuk membangun sebuah bangsa yang besar, yaitu sebuah bangsa tanpa sekat-sekat kedaerahan. Persatuan dan kesatuan nasional yang dikumandangkan tersebut, bukanlah sesuatu yang lahir begitu saja, tetapi merupakan produk dari pertumbuhan sosial dan intelektual suatu masyarakat dalam tahapan-tahapan sejarah. Selanjutnya rasa persatuan dan kesatuan nasional tersebut terus berproses dan membentuk komunitas politik yang menolak penjajahan namun tetap menghargai pluralisme, sekaligus menghormati dan memelihara keberagaman yang dimiliki. Kemajemukan masyarakat bukanlah merupakan hambatan atau kendala bagi penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, tapi merupakan potensi dan kekuatan serta kekayaan untuk kemajuan bangsa dan negara.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Lemhannas RI, menghimbau seluruh warga Lemhannas untuk meningkatkan semangat solidaritas yang kuat, memperkokoh integritas serta profesional dalam pengabdian dan menghadapi kompleksitas tugas. Hal ini sangat perlu dikembangkan sebagai modal dasar dalam meningkatkan semangat nasionalisme, dan memperkokoh karakter bangsa menuju bangsa yang makmur dan sejahtera.

KUNJUNGAN GUBERNUR LEMHANNAS RI KE MESIR DALAM RANGKA SSLN PPRA XLV

Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H., dan pejabat Lemhannas RI serta 25 peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLV melakukan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) ke Mesir untuk mempelajari upaya Mesir dalam membangun dan mempertahankan ketahanan nasionalnya. Delegasi ke Mesir merupakan bagian dari tiga rombongan PPRA XLV Lemhannas RI lainnya yang melakukan SSLN ke Jepang, Republik Ceko dan Thailand. Rombongan Lemhannas RI, pada hari pertama diterima oleh Duta Besar RI di Kairo, A.M. Fachir, yang memberikan paparan komprehensif mengenai situasi dan kondisi Mesir terkini serta status perkembangan dan proyeksi hubungan bilateral Indonesia-Mesir di Wisma Duta KBRI Kairo. Selanjutnya Gubernur memberikan kuliah umum kepada perwakilan lembaga-lembaga kemahasiswaan Indonesia yang berada di Mesir di Balai Budaya KBRI Kairo.

Selama di Mesir, Gubernur Lemhannas RI beserta rombongan peserta PPRA XLV difasilitasi oleh KBRI Kairo dalam melakukan kunjungan ke berbagai Lembaga Pemerintahan yang relevan dengan tujuan SSLN ke Mesir. Beberapa instansi yang ditemui oleh rombongan Lemhannas selama di Mesir yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Produksi Militer, Kementerian Pendidikan Tinggi, Akademi Angkatan Bersenjata, Kementerian Tenaga Kerja dan Imigrasi, Akademi Pertahanan Nasional, Lembaga Industri Militer Arab, Akademi Polisi Mubarak, Akademi Seni, serta Kementerian Pendidikan dan Pengajaran. Di berbagai lembaga negara Mesir tersebut, rombongan Lemhannas RI diterima oleh para pejabat tinggi serta menteri pemimpin lembaga-lembaga negara tersebut. Salah satu menteri yang menemui langsung delegasi Lemhannas adalah Menteri Pendidikan Tinggi Mesir, DR. Hany Hilal. Rombongan SSLN Lemhannas RI mempelajari upaya Mesir dalam rangka membangun dan mempertahankan ketahanan nasionalnya, baik melalui sarana pembangunan fisik seperti pengembangan angkatan bersenjata dan berbagai infrastrukturnya maupun melalui sarana pembangunan karakter bangsa melalui jalur pendidikan, baik pendidikan berbasis sains, sosial maupun seni dan budaya.



Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, SH memberikan cinderamata kepada Menteri Pendidikan Tinggi Mesir, DR. Hani Hilal.



Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, SH memberikan kuliah umum kepada perwakilan-perwakilan lembaga kemahasiswaan Indonesia di Mesir .



Foto bersama Gubernur Lemhannas RI beserta Rombongan SSLN PPRA XLV dengan Duta Besar Indonesia untuk Mesir serta pejabat lainnya.

KUNJUNGAN DELEGASI POLITICAL ACADEMY – VIETNAMESE PEOPLE’S ARMED FORCES (VPA)

Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsdya TNI DR. Rio Mendung Thalieb, pada tanggal 22 Oktober 2010 menerima kunjungan Direktur Akademi Politik- *Vietnamese People’s Armed Forces* (VPA), Letjen Nguyen Tien Quoc, beserta rombongan dengan 8 (delapan) anggota di ruang kerja Wakil gubernur Lemhannas RI.

Kunjungan tersebut didahului dengan acara *courtesy call* ke Wakil Gubernur Lemhannas RI, yang didampingi oleh Taprof Bid. Diplomasi, Marsda TNI (Purn) Surya Dharma, S. IP dan Karo Kerma, Brigjen TNI Endang Hairudin, ST., MM.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan acara diskusi di ruang rapat Nusantara I Gd. Trigatra Lemhannas RI pada pukul 09.30 WIB dengan pimpinan diskusi Marsda TNI (Purn) Surya Dharma, S. IP. dan dihadiri antara lain oleh Mayjen TNI (Purn) Pandji Soesilo, S. IP., DR. Rosita S. Noor, M.A., Karo Humas, Karo Kerma Lemhannas RI dan lima orang perwakilan peserta PPRA XLV.

Pada sesi diskusi dan tanya jawab, delegasi Vietnam mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan visi, misi, dan fungsi Lemhannas RI serta kegiatan, kurikulum dan metode pendidikan yang digunakan di Lemhannas RI.

Kemudian rombongan Direktur Akademi Politik- *Vietnamese People’s Armed Forces*, Letjen Nguyen Tien Quoc, dan beberapa pejabat Lemhannas RI melaksanakan foto bersama di ruang Nusantara, Gd. Trigatra. Pada akhir acara, rombongan tamu melakukan peninjauan ruang kelas di Gedung Asta Gatra Lt. III Barat, perpustakaan dan fasilitas ICT di Gedung Asta Gatra Lt. VI.



Letjen Nguyen Tien Quoc menerima plaquet dari Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsdya TNI DR. Rio Mendung Thalieb.



Diskusi yang dilaksanakan di Ruang Rapat Nusantara I, dan dipimpin oleh Marsda TNI (Purn) Surya Dharma, S.IP.



Peninjauan rombongan tamu dari Vietnam ke Perpustakaan Lemhannas RI.



Laboratorium Komputer di Gd. Astagatra Lt. VI yang ditinjau oleh rombongan tamu dari Vietnam.

KUNJUNGAN CHINESE PEOPLE'S LIBERATION ARMY COMMAND ACADEMY KE LEMHANNAS RI

Major General Zhan Yu, *President of Shi Jianzhuang Army Command Academy* beserta rombongan *Chinese People's Liberation Army (CPLA) Command Academy* mengunjungi Lemhannas RI pada 26 Oktober 2010. Rombongan yang terdiri dari instruktur, staf senior, dan akademisi tersebut berkunjung untuk mengetahui lebih mendalam mengenai bidang pendidikan dan arah kebijakan ketahanan Indonesia. Kunjungan diawali dengan *courtesy call* kepada Wakil Gubernur, Marsdya TNI DR. Rio Mendung Thalieb, dan dilanjutkan dengan diskusi bersama Tenaga Profesional Lemhannas RI yaitu Mayjen TNI (Purn) Pandji Soesilo, DR. Rosita S. Noor, M.A., dan Ir. Timotius D. Harsono, M.Sc.

Topik yang mengemuka dalam diskusi tersebut terkait dengan semakin menguatnya hubungan Indonesia dan China, terutama setelah *Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA)*. Dalam diskusi tersebut, rombongan *Chinese People's Liberation Army (CPLA)* mempertanyakan peran Lemhannas RI, dan perbedaan antara ketahanan dan pertahanan Indonesia, sistem pendidikan PPRA serta strategi dan arah kebijakan politik dan ekonomi China dan Indonesia.

Kemudian dari pihak Lemhannas RI menyampaikan bahwa pertahanan dan ketahanan adalah istilah yang berbeda, Ketahanan (Nasional) mencakup aspek Asta Gatra yang meliputi aspek Geografi, Demografi, Sumber Kekayaan Alam (Tri Gatra) dan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pertahanan Keamanan (Panca Gatra). Sementara istilah pertahanan keamanan hanya bagian



Diskusi yang membahas hubungan Indonesia-China pasca berlakunya Asean-China Free Trade Agreement.

dari ketahanan nasional, ditujukan untuk perlindungan negara secara fisik saja. Rombongan *CPLA Command Academy* juga menanyakan tentang strategi yang dijalankan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan memfokuskan pada pembangunan dan keamanan. Tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah kebijakan politik dan ekonomi liberal, di mana Indonesia harus melindungi industri dalam negeri. China juga menghadapi beberapa tantangan, yaitu dengan diberlakukannya kebijakan terbuka Pemerintah China, yaitu dengan menyeimbangkan kebijakan ekonomi liberal dengan sistem politik yang sosialis. Permasalahan yang dihadapi China saat ini adalah bagaimana mencukupi makanan dan kebutuhan mendasar populasi China sebesar 1,33 miliar jiwa.

Dalam diskusi, pembicara dari Lemhannas RI mempertanyakan mengenai kebijakan Pemerintah China yang lebih suka menginvestasikan modalnya di Amerika Serikat, bukan di Indonesia, padahal dengan menerapkan modal yang sama besar di Indonesia, investor China akan mendapat keuntungan yang lebih banyak. Besar harapan pembicara, bahwa hubungan antara Indonesia dan China bukan hanya hubungan yang menguntungkan dari satu arah saja, tapi dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Acara tersebut diakhiri dengan saling tukar cinderamata dan dilanjutkan dengan meninjau ruang kelas di Gedung Trigatra Lt. III Timur, Perpustakaan, serta bagian Telematika Lemhannas RI.



Rombongan CPLA Command Academy melakukan peninjauan Ruang kelas di Gedung Trigatra Lt. III Timur Lemhannas RI.

SERTIJAB DAN PELANTIKAN PEJABAT ESELON I, II, DAN III



Pengambilan sumpah jabatan saat pelantikan pejabat eselon I di ruang Nusantara, Gd. Trigatra Lemhannas RI.

Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H. memimpin pengambilan sumpah pejabat Lemhannas RI pada acara serah terima jabatan dan pelantikan pejabat eselon I, II, dan III di Ruang Nusantara, Gd. Trigatra pada 8 November 2010. Beberapa pejabat yang hadir pada acara tersebut antara lain Wakil Gubernur, Marsda TNI DR. Rio Mendung Thalieb, M.Sc., Ph.D., Sekretaris Utama, DR. Ardi Partadinata, Para Deputi, Pejabat Struktural, Para Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji, Tenaga Ahli Profesional, Pengurus Dharma Wanita Lemhannas RI, dan undangan lainnya.

Serah terima jabatan (Sertijab) yang dilaksanakan di Lemhannas RI adalah proses regenerasi dan wujud proses pembinaan baik organisasi maupun personel yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan sesuai dengan situasi yang dihadapi, sehingga diharapkan kinerja organisasi dapat dicapai dengan lebih optimal.

Para pejabat yang melaksanakan sertijab sebanyak 15 orang yang terdiri atas 10 orang pejabat Eselon I, 2 orang Eselon II, dan 3 orang Eselon III, antara lain Dra. Ratnasari Azahari, MPA sebagai Tenaga Ahli Bid. Demografi dan

Brigjen TNI Kusworo, M.Sc. sebagai Tenaga Ahli Pengajar Bidang Ilpengtek. Pejabat yang diangkat diantaranya Kolonel Inf Irwan Kusnadi, S.Sos., M.Sc., Kolonel Laut (P) E. Estu Prabowo dan Kolonel Laut (E) Suratno; dan pejabat yang memasuki masa purna bhakti antara lain Marsda TNI (Purn) IR. A. Chafied H.M. S.E.E, M.Sc. dan Marsda TNI (Purn) Surya Dharma, S.IP.



Penandatanganan berita acara serah terima jabatan Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI dari Brigjen TNI Kusworo, M.Sc kepada Kolonel Inf Irwan Kusnadi, S.Sos., M.Sc.

INTELLECTUAL EXERCISE DEWAN PENGARAH LEMHANNAS RI



Brigjen TNI (Purn) A. R. Wetik, S.IP, M.Sc dan Marsda TNI (Purn) Sumarman, S.E. hadir sebagai pemapar dalam Intellectual Exercise.

Intellectual Exercise bertema "Paradigma Baru Ideologi Pancasila dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014" yang diselenggarakan oleh Dewan Pengarah Lemhannas RI pada tanggal 17 November 2010 di Ruang Rapat Astagatra Lt. III Barat dibuka oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsdya TNI DR. Rio Mendung Thalieb, yang dihadiri oleh para Tajar, Taji, dan Taprof beserta pejabat struktural lainnya.

Brigjen TNI (Purn) A. R. Wetik, S.IP, M.Sc. sebagai pemapar pertama memaparkan tentang "Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)", dan dilanjutkan oleh pemapar kedua oleh Marsda TNI (Purn) Sumarman, S.E. dengan tema "Peningkatan Pemahaman Pancasila sebagai landasan Idiil dalam Pembangunan Nasional". Seusai pemaparan, para peserta *Intellectual Exercise* memberikan tanggapan dan masukan untuk penyempurnaan makalah.



Wakil Gubernur Marsdya TNI DR. Rio Mendung Thalieb, M.Sc, Ph.D membuka kegiatan Intellectual Exercise Dewan Pengarah di Ruang Rapat Gd. Astagatra Lt. III Barat.

Pengarah : DR. Ardi Partadinata, M.H., M.Si.

Penanggung Jawab : Kolonel Inf Irwan Kusnadi, S.Sos., M.Sc., **Redaktur :** Megawarni Simamora, S.E, M.M

Penyunting/Editor : Kolonel Laut (P) E. Estu Prabowo, Letkol Adm. Drs. M. Syahril, M.M., Mayor Inf. Risnal S.H., M.A.

Redaktur Pelaksana : Linda Purnamasari S.Sos., Endah Heliana, S.Sos., Trias Noverdi, S.S.

Desain Grafis & Fotografer : Arianto S.H., Sertu Syafrizal, Bambang Iman Aryanto, S.T.

Sekretariat : Gatot, Arief Ardiyanto, S.Sn.

Alamat Redaksi : Biro Humas Settama Lemhannas RI, Jl. Merdeka Selatan No. 10 Jak-Pus (10110)

Telp. (021) 3832108, 3832109, Fax. (021) 3451926,

Website <http://www.lemhannas.go.id>